

HUBUNGAN FALSAFAH NASIONAL DENGAN PRAKTIK PENDIDIKAN PADA KURIKULUM MERDEKA

Muhammad Fakhri Ramadhan¹, Muhammad Sirozi²,
Abdurrahmansyah³, Nurul Ahmad⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

¹fakhrimfr3@gmail.com, ²msirozi_uin@radenfatah.ac.id,

³abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id, ⁴nurulahmad13@gmail.com,

ABSTRACT

Indonesia's national philosophy serves as the ideological and moral foundation that guides the administration of national education, particularly through the values of Pancasila and the constitutional principles of the 1945 Constitution (UUD 1945). This philosophy emphasizes that education aims not only to enlighten the nation's life but also to shape Indonesian individuals who are characterized, moral, and capable of living harmoniously within diversity. This study aims to comprehensively examine the relationship between the national philosophy and educational practices in Indonesia, including the normative foundation, implementation in the curriculum, the teacher's role as a value internalizer, challenges faced, as well as its strategic relevance in human resource development. This study employs a library research method by reviewing scientific literature published in the past ten years, including academic books, national and international journals, and relevant research reports. The study results indicate that the national philosophy serves as a fundamental guide in formulating goals, curriculum, and learning practices. The values of Pancasila are operationalized through the Merdeka Curriculum, the Pancasila Student Profile, and project-based learning that emphasizes character development, critical thinking, creativity, collaboration, and spirituality. Teachers play an important role as models, value facilitators, and agents of social transformation in ensuring that the internalization of values occurs meaningfully. However, the implementation of the national philosophy still faces various challenges, such as policy-practice gaps, limitations in teacher competencies, the influence of individualistic digital culture, socio-cultural heterogeneity, and educational facility disparities. Nevertheless, strengthening the application of the national philosophy is considered strategic in developing superior human resources with character, global competitiveness, and contributions to national development.

Keywords: national philosophy, pancasila, national education, character formation

ABSTRAK

Falsafah nasional Indonesia merupakan dasar ideologis dan moral yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama melalui nilai-nilai Pancasila dan prinsip konstitusional UUD 1945. Falsafah ini menegaskan bahwa

pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, bermoral, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara falsafah nasional dan praktik pendidikan di Indonesia, meliputi landasan normatif, implementasi dalam kurikulum, peran guru sebagai penginternalisasi nilai, tantangan yang dihadapi, serta relevansi strategisnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur ilmiah terpublikasi dalam sepuluh tahun terakhir, termasuk buku akademik, jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang relevan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa falsafah nasional berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam merumuskan tujuan, kurikulum, dan praktik pembelajaran. Nilai-nilai Pancasila dioperasionalkan melalui Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, serta pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pengembangan karakter, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan spiritualitas. Guru berperan penting sebagai model, fasilitator nilai, dan agen transformasi sosial dalam memastikan internalisasi nilai berlangsung secara bermakna. Namun, implementasi falsafah nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kebijakan dan praktik, keterbatasan kompetensi guru, pengaruh budaya digital yang individualistik, heterogenitas sosial-budaya, serta ketimpangan sarana pendidikan. Meskipun demikian, penguatan penerapan falsafah nasional dianggap strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul yang berkarakter, berdaya saing global, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Kata Kunci: falsafah nasional, pancasila, pendidikan nasional, pembentukan karakter

A. Pendahuluan

Falsafah nasional Indonesia merupakan fondasi ideologis dan moral yang membimbing arah pembangunan bangsa, termasuk dalam bidang pendidikan. Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sumber nilai utama, bersama UUD 1945 sebagai kerangka konstitusional, menjadi acuan dalam merumuskan tujuan serta orientasi pendidikan nasional.

Pendidikan di Indonesia tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis dalam keberagaman (Kemendikbud, 2020). Dengan demikian, upaya memahami hubungan falsafah nasional dan praktik pendidikan merupakan urgensi strategis dalam merespon tantangan global dan dinamika perubahan sosial.

Dalam konteks modern, pendidikan dituntut menjadi ruang internalisasi nilai kebangsaan sekaligus arena pemberdayaan potensi peserta didik. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini sebagai kerangka etis yang mampu memperkuat karakter kebangsaan sekaligus menyiapkan peserta didik menghadapi tuntutan global (Tilaar, 2018). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat bergantung pada bagaimana nilai filosofis dioperasionalkan secara konkret dalam kurikulum dan praktik pembelajaran (Subadi et al., 2021).

Namun, realitas implementasi pendidikan nasional tidak selalu berjalan sejalan dengan filosofi negara. Kompleksitas sistem pendidikan, perbedaan konteks sosial-budaya, ketimpangan antarwilayah, serta kemajuan teknologi digital seringkali menjadi faktor yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila tidak terserap secara optimal dalam praktik pendidikan sehari-hari (Maryono, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting

untuk mengkaji sejauh mana falsafah nasional dipraktikkan dalam penyelenggaraan pendidikan, serta bagaimana tantangan implementasinya dapat diatasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Berdasarkan obyek kajian, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat literatur atau kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai referensi seperti buku, hasil penelitian, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan (Sari & Asmendri, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni dokumentasi dengan cara mempelajari berbagai literatur berupa sumber data primer maupun sekunder. sumber primer adalah buku dan artikel akademik yang secara langsung mengulas konsep hubungan falsafah dengan praktik pendidikan serta teori-teori yang mendasarinya. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi karya ilmiah, laporan penelitian, dan tulisan lain yang mendukung dan memperkaya

analisis, terutama yang berkaitan dengan proses praktik pendidikan dan kaitannya dengan falsafah. Teknik analisis data yang dilakukan penulis yaitu dengan teknik analisis isi (konten analysis) dalam bentuk deskriptif analisis yakni berupa pembahasan secara mendalam terhadap permasalahan yang dibahas (Sya'roni, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Falsafah Nasional sebagai Landasan Normatif Pendidikan

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan normatif yang membentuk arah serta orientasi pendidikan nasional Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis yang mengandung nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa, sedangkan UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggaraan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas

peserta didik (Subadi et al., 2021). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa arah pendidikan Indonesia secara tegas berakar pada nilai-nilai moral universal dan nilai-nilai kebangsaan. Nilai Ketuhanan dalam Pancasila mengamanatkan bahwa pendidikan harus menempatkan aspek spiritualitas, etika, dan religiusitas sebagai bagian integral dari kurikulum. Pendidikan dipandang bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga sarana pembentukan manusia yang memiliki kepekaan moral dan sikap berketuhanan (Zein et al., 2020). Selanjutnya, nilai Kemanusiaan mendorong pendidikan untuk menghargai martabat manusia, menjamin kesetaraan akses dan kesempatan belajar, serta menumbuhkan karakter empati, toleransi, dan solidaritas antaranggota masyarakat (Subadi et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik diperlakukan sebagai individu yang unik dan memiliki hak yang sama untuk berkembang secara optimal.

Sementara itu, nilai Persatuan menuntut agar pendidikan dijalankan secara inklusif, berorientasi multikultural, dan mampu memperkuat integrasi nasional. Pendidikan harus menjadi ruang yang memfasilitasi

perjumpaan berbagai latar belakang budaya, agama, dan sosial sehingga tercipta pemahaman kebangsaan yang kokoh (Zein et al., 2020). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan identitas nasional dan kohesi sosial di tengah keberagaman bangsa.

Nilai Kerakyatan dalam Pancasila mengharuskan pendidikan untuk mengembangkan budaya demokratis di lingkungan sekolah. Prinsip musyawarah, penghormatan terhadap pendapat orang lain, dan pengambilan keputusan secara kolektif harus menjadi bagian dari proses pembelajaran maupun pengelolaan satuan pendidikan. Melalui penerapan nilai ini, peserta didik dilatih untuk menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hakim, 2022). Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter demokratis sehingga generasi muda mampu berkontribusi pada penyelenggaraan kehidupan sosial-politik yang adil dan berkeadaban. Selanjutnya, nilai Keadilan Sosial mengarahkan pendidikan untuk

memastikan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah, sesuai amanat UUD 1945, berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana, dan kebijakan yang menjamin bahwa seluruh peserta didik baik di perkotaan maupun di daerah terpencil memperoleh layanan pendidikan yang layak (Subadi et al., 2021). Nilai ini sekaligus menekankan bahwa pendidikan harus menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan nasional berfungsi sebagai pendorong terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial sesuai cita-cita luhur bangsa.

Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis, tetapi juga pedoman substantif dan operasional bagi seluruh kebijakan pendidikan. Keduanya memastikan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual, unggul secara moral, serta memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan pembangunan bangsa (Subadi et al., 2021). Maka dapat disimpulkan

bahwa falsafah nasional menjadi arah dasar yang memastikan pendidikan Indonesia berjalan sesuai jati diri bangsa dan menghasilkan generasi yang berkarakter Pancasila.

A. Integrasi dalam Kebijakan dan Kurikulum Merdeka Pada Proses Pembelajaran

Kurikulum nasional berperan sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan nilai-nilai filosofis negara ke dalam praktik pendidikan yang nyata. Kurikulum Merdeka, yang diterapkan secara bertahap sejak 2021, menegaskan integrasi nilai Pancasila melalui Profil Pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong (Kemendikbudristek, 2021). Dimensi-dimensi ini bukan hanya merepresentasikan nilai dasar Pancasila, tetapi juga mengadaptasi kebutuhan kompetensi abad ke-21, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, serta literasi global (Widiastuti & Yuliana, 2021).

Selain itu, kebijakan Kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan yang memfasilitasi pengalaman

belajar autentik. *Project-Based Learning* memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam identifikasi dan penyelesaian masalah sosial, berkolaborasi dalam kelompok, serta mempraktikkan kreativitas secara kontekstual (Sari & Rahmawati, 2022). Melalui pendekatan ini, nilai gotong royong, kemandirian, dan kreativitas tidak hanya diajarkan secara teoritis tetapi diinternalisasi melalui pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Implementasi Kurikulum Merdeka juga memperkuat peran guru sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar peserta didik. Dalam paradigma ini, guru tidak lagi sekadar menjadi sumber utama informasi, melainkan pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar fleksibel dan memberi ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi potensi dirinya secara optimal (Husna & Pramesti, 2022). Pendekatan diferensiasi yang menjadi salah satu ciri Kurikulum Merdeka memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan tingkat

pencapaian masing-masing. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila tercermin melalui pemberian kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkembang, tanpa terbatas oleh perbedaan kemampuan maupun latar belakang sosial.

Lebih jauh, kurikulum ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perubahan global dan perkembangan teknologi. Integrasi literasi digital, literasi budaya, serta kecakapan hidup dalam struktur Kurikulum Merdeka memperkuat kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan abad ke-21, seperti disrupsi teknologi dan kompleksitas sosial (Wulandari & Harjito, 2022). Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai kompas moral yang menjaga agar perkembangan kompetensi tidak lepas dari orientasi etis dan tanggung jawab kebangsaan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual dan keterampilan teknis, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik tetap berpegang pada nilai luhur bangsa dalam menjalani kehidupan global yang dinamis.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan instrumen yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam pembelajaran modern. Kurikulum ini mampu menjembatani antara landasan filosofis pendidikan nasional dan tuntutan kompetensi abad ke-21, sehingga tidak hanya mengembangkan aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kompetensi sosial yang relevan bagi pembangunan bangsa.

B. Implementasi Nilai dalam Praktik Pembelajaran

Falsafah nasional tidak hanya diwujudkan melalui perumusan kurikulum dan regulasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru berperan sebagai figur keteladanan yang mempraktikkan nilai Pancasila melalui sikap, ucapan, dan tindakan sehari-hari (Lestari, 2020). Keteladanan ini menjadi bentuk pendidikan karakter paling mendasar karena peserta didik belajar tidak hanya melalui instruksi, tetapi melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Dengan demikian, guru memegang fungsi strategis sebagai

penyampai nilai moral, budaya, dan etika yang menjadi bagian dari falsafah nasional.

Selain sebagai teladan, guru juga bertindak sebagai fasilitator nilai yang membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan belajar yang bermakna. Pembelajaran berbasis dialog, kolaboratif, dan partisipatif mencerminkan nilai kerakyatan serta penghargaan terhadap martabat manusia yang sejalan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam proses ini, peserta didik diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, saling menghargai, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, sehingga nilai demokrasi dan toleransi dapat tumbuh secara alami di lingkungan kelas (Hidayat et al., 2019).

Pendekatan pedagogis modern seperti *inquiry learning* dan *problem-based learning* turut memperkuat dimensi bernalar kritis sebagai bagian dari Profil Pelajar Pancasila. Melalui strategi ini, peserta didik dilatih untuk mengkaji fenomena, menganalisis data, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan berdasarkan proses berpikir ilmiah. Sementara itu,

kegiatan kooperatif misalnya kerja kelompok, proyek sosial, atau simulasi kolaboratif memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempraktikkan nilai gotong royong. Dengan demikian, model dan metode pembelajaran yang dipilih guru memiliki kontribusi langsung dalam mewujudkan karakter Pancasila secara aplikatif (Widiastuti & Yuliana, 2021).

Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Sebagian guru belum memiliki kompetensi pedagogis yang memadai untuk merancang pembelajaran berbasis nilai secara integratif. Di beberapa sekolah, pendidikan karakter masih bersifat simbolik, sekadar memenuhi tuntutan administrasi, atau hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tanpa pendalaman makna (Maryono, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara ideal filosofis falsafah nasional dan praktik pendidikan di lapangan. Ketidaksiapan guru serta keterbatasan pelatihan menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan falsafah nasional dalam pendidikan sangat bergantung pada kualitas praktik pedagogis guru. Falsafah nasional tidak akan bermakna apabila hanya berhenti sebagai dokumen normatif, karena internalisasi nilai terjadi melalui keteladanan, interaksi, dan pengalaman belajar yang dihadirkan guru. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas profesional guru, penguatan supervisi akademik, serta penyediaan pendampingan pedagogis yang berkelanjutan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terimplementasi secara autentik dan konsisten dalam proses pembelajaran.

C. Tantangan Implementasi Falsafah Nasional dalam Pendidikan

Implementasi falsafah tantangan dalam penerapan falsafah praktik nasional pendidikan di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa aspek fundamental yang memengaruhi efektivitas internalisasi nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Berbagai faktor struktural, kultural, dan pedagogis menunjukkan bahwa implementasi falsafah nasional

masih menghadapi hambatan yang perlu dicermati secara komprehensif.

1. Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik di Tingkat Sekolah

Salah satu tantangan paling menonjol dalam implementasi falsafah nasional adalah ketidaksinkronan antara kebijakan pendidikan dengan praktik yang terjadi di sekolah. Secara normatif, kebijakan pendidikan yang dirumuskan pemerintah telah menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi utama pembelajaran. Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah belum mampu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam proses pembelajaran yang holistik dan bermakna. Penelitian Maryono (2020) menegaskan bahwa implementasi nilai sering bersifat administratif, sekadar memenuhi tuntutan formal tanpa pendekatan internalisasi yang mendalam. Hal ini mengakibatkan tujuan filosofis pendidikan nasional tidak tercapai secara optimal, terutama dalam konteks pembentukan karakter dan etika peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan kebijakan dan praktik menjadi hambatan sentral yang menghambat

efektivitas penerapan falsafah nasional.

2. Keterbatasan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Pedagogi Berbasis Nilai

Guru merupakan aktor kunci dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran. Namun, tantangan yang muncul adalah tidak meratanya kompetensi pedagogis guru, khususnya dalam menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis nilai atau value-based pedagogy. Banyak guru masih berfokus pada pencapaian kompetensi kognitif sehingga aspek afektif dan moral kurang mendapat perhatian. Studi-studi pendidikan menekankan bahwa guru membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai strategi pedagogis seperti pembelajaran reflektif, diskusi nilai, experiential learning, dan problem-based character development (Hidayat et al., 2019). Tanpa kapasitas pedagogis tersebut, proses internalisasi nilai cenderung tidak sistematis dan bersifat permukaan. Maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi guru menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberhasilan implementasi falsafah nasional.

3. Pengaruh Budaya Digital yang Tidak Selaras dengan Nilai Falsafah Pendidikan Nasional

Arus budaya digital yang semakin dominan juga menjadi tantangan besar dalam menguatkan falsafah nasional. Di era media sosial dan globalisasi digital, peserta didik mendapatkan paparan informasi dan budaya yang sangat luas, yang tidak semuanya sejalan dengan nilai Pancasila. Banyak konten digital memuat nilai individualisme, konsumerisme, hedonisme, dan relativisme moral yang kontras dengan nilai gotong royong, integritas, dan spiritualitas yang menjadi dasar falsafah nasional. Tanpa penguatan literasi digital, peserta didik mudah terpengaruh pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai dengan karakter kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai di sekolah harus diimbangi dengan kemampuan kritis terhadap budaya digital (Lestari, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa budaya digital menjadi tantangan kontekstual yang menghambat konsistensi penanaman nilai Pancasila.

4. Heterogenitas Sosial-Budaya dalam Pemaknaan dan Implementasi Nilai

Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen baik dari aspek budaya, agama, bahasa, maupun struktur sosial. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam implementasi nilai-nilai falsafah nasional. Pemaknaan terhadap nilai Pancasila tidak selalu seragam di seluruh wilayah atau kelompok masyarakat. Konteks kultural yang berbeda menyebabkan masing-masing daerah menerjemahkan nilai tertentu sesuai karakter lokal, sehingga implementasinya tidak selalu konsisten. Penelitian pendidikan karakter menunjukkan bahwa keragaman pemaknaan nilai dapat menyebabkan ketidaksinkronan antara tujuan nasional dan praktik lokal (Hidayat et al., 2019). Untuk itu, pendekatan pendidikan perlu adaptif dan mampu menjembatani pluralitas tersebut agar tetap berada dalam koridor falsafah nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa heterogenitas sosial-budaya menjadi faktor determinan yang memengaruhi variasi implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan.

5. Keterbatasan Sarana Pendidikan dan Ketimpangan Antarwilayah

Tantangan lainnya adalah ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah. Banyak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) yang belum memiliki fasilitas memadai untuk melaksanakan pendidikan yang mendukung internalisasi nilai secara optimal. Akses terhadap teknologi, bahan ajar berkualitas, serta lingkungan pembelajaran yang mendukung masih terbatas. Kondisi ini membuat proses penanaman nilai menjadi kurang efektif karena tidak didukung oleh sarana yang memadai, sementara sekolah di daerah perkotaan memiliki fasilitas yang jauh lebih baik. Ketimpangan ini berimplikasi pada kualitas karakter peserta didik yang tidak merata secara nasional (Maryono, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi hambatan struktural dalam penerapan falsafah nasional secara merata.

D. Implikasi terhadap

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Pendidikan yang berakar pada falsafah nasional memiliki peran strategis dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan

berdaya saing. Falsafah nasional memberikan arah normatif bagi tujuan pendidikan sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan nilai dan moralitas kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kerangka filosofis yang menjadi fondasi identitas bangsa. Integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan berfungsi memperkuat identitas nasional peserta didik. Nilai-nilai religiositas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi pedoman dalam membentuk generasi yang menghargai keberagaman serta memiliki komitmen terhadap persatuan nasional. Internalisasi nilai ini menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi yang sering kali menantang stabilitas identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, pendidikan berbasis falsafah nasional berperan signifikan dalam pembentukan integritas moral peserta didik. Melalui pembiasaan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, sekolah menjadi ruang untuk menumbuhkan karakter yang kokoh. Guru dalam hal ini memiliki peran sentral sebagai model

nilai yang secara konsisten menunjukkan perilaku teladan yang dapat diimitasi peserta didik (Creswell & Creswell, 2018). Pendidikan yang dilandasi falsafah nasional juga berkontribusi dalam pengembangan kompetensi abad ke-21. Nilai Pancasila dipadukan dengan kemampuan seperti kreativitas, pemikiran kritis, komunikasi, dan kolaborasi sehingga peserta didik menjadi pribadi yang adaptif secara intelektual sekaligus beretika. Integrasi antara nilai dan kompetensi ini sangat diperlukan untuk menciptakan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan orientasi moral. Selain itu, pendidikan berbasis falsafah nasional mendorong terciptanya lingkungan belajar yang humanis dan inklusif. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Pancasila mengarahkan sekolah untuk mengembangkan iklim pembelajaran yang memanusiakan peserta didik, menghargai perbedaan, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensi dan bakatnya.

Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga tempat untuk

menumbuhkan empati, kolaborasi, dan solidaritas sosial (Subadi et al., 2021). Dengan demikian, lembaga pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkepribadian matang dan mampu berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat plural. Selanjutnya, falsafah nasional memberikan landasan bagi penguatan ketahanan budaya bangsa melalui pendidikan. Dalam menghadapi arus globalisasi dan derasya penetrasi budaya asing, pendidikan berperan sebagai benteng nilai yang menjaga kontinuitas identitas nasional. Melalui kurikulum yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, sejarah Indonesia, dan wawasan kebangsaan, peserta didik dibekali kemampuan untuk menyaring pengaruh global secara selektif tanpa kehilangan jati diri. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang kompeten secara global, tetapi juga memiliki loyalitas kebangsaan yang kuat serta komitmen untuk menjaga kedaulatan budaya bangsa (Zein et al., 2020).

Dengan keseluruhan peran strategis tersebut, penguatan falsafah nasional dalam pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa. Pendidikan

yang efektif dalam menanamkan nilai Pancasila akan membentuk generasi yang berintegritas, beridentitas nasional kuat, dan berkompetensi tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan berbasis falsafah nasional menjadi fondasi penting bagi pembangunan karakter dan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

D. Kesimpulan

Falsafah nasional merupakan dasar normatif yang memberikan arah bagi seluruh proses pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya Pancasila, menjadi fondasi pembentukan karakter, moralitas, dan identitas peserta didik. Melalui falsafah nasional, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkepribadian luhur dan memiliki komitmen terhadap nilai kebangsaan. Dalam implementasinya, falsafah nasional diwujudkan melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang menekankan integrasi nilai, pembiasaan sikap, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Guru menjadi aktor

utama yang memastikan bahwa interaksi edukatif berjalan secara humanis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berfungsi tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk watak dan integritas generasi bangsa. Selain itu, falsafah nasional menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang beradab, demokratis, dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap kemanusiaan diharapkan tertanam melalui praktik pembelajaran dan kehidupan sekolah. Integrasi nilai ini penting untuk menghadapi tantangan global, termasuk arus digitalisasi, heterogenitas sosial, dan dinamika budaya yang terus berubah. Penguatan implementasi falsafah nasional juga berperan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang selaras dengan falsafah nasional mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan berbasis

falsafah nasional menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan falsafah nasional dalam pendidikan merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas karakter, kompetensi, dan peradaban masyarakat Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hakim, L. (2022). Implementasi nilai demokrasi dalam pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 145–155.
- Hidayat, A., Supriyadi, S., & Rahman, F. (2019). Penguatan nilai-nilai karakter melalui model pembelajaran kolaboratif di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 45–57.
- Husna, A., & Pramesti, D. (2022). Peran guru sebagai fasilitator dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 7(1), 33–42.
- Kemendikbud. (2020). *Profil Pelajar Pancasila dan Penguatan Pendidikan Karakter*. Kementerian Pendidikan dan

- | | |
|---|--|
| <p>Kebudayaan Indonesia.</p> <p>Kemendikbudristek. (2021). <i>Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka</i>. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Lestari, I. (2020). Peran guru sebagai fasilitator nilai dalam pembelajaran abad 21. <i>Jurnal Ilmu Pendidikan</i>, 22(3), 178–186.</p> <p>Maryono, A. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah. <i>Jurnal Pendidikan Karakter</i>, 10(2), 145–156.</p> <p>Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penulisan karya ilmiah. <i>Jurnal Keilmuan dan Pendidikan</i>, 1(1), 33–40.</p> <p>Sari, R., & Rahmawati, Y. (2022). Pembelajaran berbasis proyek dalam membentuk karakter peserta didik pada Kurikulum Merdeka. <i>Jurnal Inovasi Pendidikan</i>, 12(2), 88–99.</p> <p>Subadi, T., Wulandari, M., & Pratiwi, A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. <i>Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara</i>, 7(1), 52–63.</p> <p>Suyatno, S., Nuryana, Z., & Arifin, I. (2020). Kepemimpinan berbasis nilai di sekolah. <i>Jurnal</i></p> | <p><i>Manajemen Pendidikan</i>, 14(1), 34–49.</p> <p>Sya'roni, M. (2021). Analisis isi dalam penelitian kualitatif: Konsep dan aplikasinya. <i>Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian</i>, 5(2), 112–123.</p> <p>Tilaar, H. A. R. (2018). <i>Kekuasaan dan pendidikan: Suatu tinjauan dari perspektif budaya</i>. Rineka Cipta.</p> <p>Widiastuti, A., & Yuliana, I. (2021). Kurikulum Merdeka dan penguatan profil pelajar Pancasila. <i>Jurnal Pendidikan Nasional</i>, 5(2), 120–132.</p> <p>Wulandari, S., & Harjito, A. (2022). Literasi digital dalam Kurikulum Merdeka. <i>Jurnal Teknologi Pendidikan Modern</i>, 4(1), 55–66.</p> <p>Zein, M., Hidayat, T., & Rahmat, A. (2020). Nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan pendidikan nasional. <i>Jurnal Filsafat dan Pendidikan</i>, 4(1), 33–47.</p> |
|---|--|